

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	11
a. Pengertian Tindak Pidana	11
b. Tindak Pidana Korupsi.....	15
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.....	20
d. Aparat Penegak Hukum	24
e. Konsepsi Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi	28
F. Kerangka Teori	31
a. Teori Penegakan Hukum	31
b. Teori Keadilan.....	34
c. Teori Pengawasan.....	35

G. Metode Penelitian	37
1. Metode Pendekatan	37
2. Spesifikasi Penelitian.....	38
3. Objek Penelitian	38
4. Sumber Data.....	39
5. Metode Pengumpulan Data	41
6. Metode Penyajian Data.....	42
7. Metode Analisis Data	42
H. Sistematika Penulisan	43
 BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	44
1. Pengertian Tindak Pidana.....	44
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	50
B. Tindak Pidana Korupsi.....	57
1. Definisi Korupsi	57
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	66
C. Tinjauan Umum Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	78
1. Konsep Pengawasan.....	78
a. Pengertian Pengawasan	78
b. Macam-Macam Pengawasan.....	82
c. Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan.....	85
d. Metode Pengawasan.....	87

2. Pengertian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	89
D. Tinjauan Umum Aparat Penegak Hukum (APH)	99
1. Definisi Penegakan Hukum.....	99
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	105
3. Aparat Penegak Hukum (APH).....	108
E. Konsepsi Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi	112
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah	120
B. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.....	133
C. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri, Polri, dan Kejagung Dalam Penanganan Indikasi Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah.....	143
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	155